



## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Definisi Pajak	3
2.2 Fungsi Pajak	3
2.3 Jenis Pajak	4
2.4 Pengertian PPN	4
2.5 Karakteristik PPN di Indonesia	4
2.6 Subjek Pajak PPN	5
2.7 Objek Pajak PPh Pasal 23	6
2.8 Saat Terutang PPN	6
2.9 Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN	7
2.10 Bendaharawan Sebagai Pemungut PPN	7
2.11 Tarif PPN	8
2.12 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN	8
2.13 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	8
2.14 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23	8
2.15 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.16 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	9
2.17 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.18 Saat Terutang Pajak Penghasilan Pasal 23	10
2.19 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	10
III. METODE	10
3.1 Lokasi dan Waktu PKL	10
3.2 Teknik Pengumpulan Data	10
IV. KEADAAN UMUM INSTANSI	11
4.1 Sejarah Kementerian Ketenagakerjaan	11
4.2 Struktur Organisasi	12
4.3 Visi dan Misi	13
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	14
5.1 Objek Pajak PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	14
5.2 Penerapan pemungutan PPN, Pemotongan PPh Pasal 23, serta perhitungan PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

	BINWASNAKER Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	15
5.3	Penerapan penyetoran PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER Kementerian Ketenagakerjaan	20
5.4	Penerapan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 di Direktorat Jendral BINWASNAKER Ketenagakerjaan Republik Indonesia	23
5.5	Evaluasi Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada Ditjen BINWASNAKER KEMNAKER	25
	VI. SIMPULAN DAN SARAN	27
6.1	Simpulan	27
6.2	Saran	28
	DAFTAR PUSTAKA	28
	LAMPIRAN	30



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies



## DAFTAR TABEL

1	Evaluasi Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada Ditjen BINWASNAKER KEMNAKER	25
---	--	----

## DAFTAR GAMBAR

1	Grafik Perkembangan Penerimaan Pajak Lima Tahun Terakhir (dalam Triliun)	1
2	Struktur organisasi BINWASNAKER Kementerian Ketenagakerjaan RI	12
3	Faktur Pajak	18
4	Laman pembuatan E-Billing untuk penyetoran PPN	21
5	Laman Pembuatan E-Billing untuk penyetoran PPh Pasal 23	22
6	<i>Flowchart</i> Penyetoran Pajak	23
7	Tampilan Aplikasi SAS 2021	24
8	<i>Flowchart</i> Pelaporan Pajak	25

## DAFTAR LAMPIRAN

1	Faktur Barang untuk PPN	31
2	SPBY untuk PPN	32
3	Kwintansi Pembayaran Pembelian Barang (untuk transaksi yang dikenakan PPN)	33
4	SSE BPN	33
5	BPN (Bukti Pembayaran Negara) PPN	35
6	Nota Konfirmasi Penerimaan Negara untuk PPN	36
7	Faktur Barang untuk PPh Pasal 23	37
8	Kwintansi Pembayaran Sewa PPh Pasal 23	38
9	SPBY PPh Pasal 23	39
10	SSE PPh Pasal 23	40
11	Bukti Penerimaan Negara (PBN) PPh Pasal 23	41
12	Nota Konfirmasi Penerimaan Negara PPh Pasal 23	42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.